Dinamika Politik terhadap Keberlanjutan Operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah

Icca Bella Syahputri¹, Mayang Sari², Dakli Nasution³, M.Fadli Ritonga⁴, M. Wahyudi Arrasyid⁵, Abu Syahrin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan

e-mail: sarimayang47@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dinamika politik terhadap keberlanjutan operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah. Faktor politik memainkan peran krusial dalam menentukan kelangsungan operasional perusahaan. Metode penelitian melibatkan analisis kebijakan, wawancara, dan studi literatur dengan pengumpulan data dari dokumen kebijakan, wawancara pemangku kepentingan, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik di tingkat lokal dan nasional berdampak signifikan terhadap keberlanjutan operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah. Perubahan kebijakan pemerintah, pergeseran kekuasaan politik, dan konflik politik lokal dapat mempengaruhi langsung atau tidak langsung operasional perusahaan. Oleh karena itu, manajemen PTPN 4 Dolok Sinumbah perlu mengadopsi strategi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan politik. Keterlibatan aktif dalam dialog dengan pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat lokal dapat membantu mengatasi tantangan yang timbul akibat dinamika politik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pemahaman hubungan antara dinamika politik dan keberlanjutan operasional perusahaan perkebunan negara. Implikasi hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor perkebunan menghadapi potensi perubahan politik di masa depan.

Kata Kunci: Dinamika Politik, Keberlanjutan Operasional, PTPN 4 Dolok Sinumbah.

Abstract

This research aims to analyze the impact of political dynamics on the operational sustainability of PTPN 4 Dolok Sinumbah. Political factors play a crucial role in determining the continuity of company operations. The research method involves policy analysis, interviews, and literature studies with data collection from policy documents, stakeholder interviews, and relevant literature. The research findings indicate that political dynamics at the local and national levels significantly affect the operational sustainability of PTPN 4 Dolok Sinumbah. Government policy changes, shifts in political power, and local political conflicts can directly or indirectly influence company operations. Therefore, the management of PTPN 4 Dolok Sinumbah needs to adopt adaptive and responsive strategies to political changes.

Active engagement in dialogue with the government, stakeholders, and the local community can help overcome challenges arising from political dynamics. This research is expected to contribute to understanding the relationship between political dynamics and the operational sustainability of state-owned plantation companies. The implications of these research findings can serve as a basis for developing policies that support the sustainability of the plantation sector in facing potential political changes in the future.

Keywords: Political Dynamics, Operational Sustainability, PTPN 4 Dolok Sinumbah.

PENDAHULUAN

Politik memiliki dampak besar pada dunia bisnis, memengaruhi organisasi dan karyawan di dalamnya. Pertama, politik dapat memengaruhi kebijakan dan regulasi bisnis seperti pajak, lingkungan, dan perdagangan. Perubahan dalam kebijakan ini dapat berpengaruh pada strategi operasional dan keuangan perusahaan, mempengaruhi daya saing di pasar, dan menciptakan peluang atau hambatan bagi pertumbuhan. Politik juga memainkan peran penting dalam reputasi dan citra suatu organisasi. Tindakan politik oleh pemimpin atau pemilik perusahaan dapat memicu respons kuat dari masyarakat, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Organisasi yang terlibat dalam kontroversi politik atau dianggap tidak etis dalam praktik bisnis mereka dapat menghadapi tekanan publik yang merugikan citra dan hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis (Warjio, 2016).

Politik juga mempengaruhi budaya organisasi dan dinamika di dalamnya. Perbedaan pandangan politik karyawan dapat menciptakan ketegangan di tempat kerja, memengaruhi komunikasi, dan bahkan mengganggu produktivitas. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki kebijakan yang jelas untuk mengelola masalah politik di tempat kerja dan mempromosikan kerjasama yang sehat di antara karyawan. Dalam menghadapi perubahan politik yang terus-menerus, pemahaman dan manajemen yang bijak terhadap pengaruh politik pada organisasi dan karyawan adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dan kesuksesan bisnis (Saragih, 2014).

Perkebunan sebagai sektor ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam kontribusinya terhadap perekonomian, baik di tingkat regional maupun nasional. Pada khususnya, Perusahaan Perkebunan Negara (PTPN) 4 Dolok Sinumbah menjadi salah satu entitas yang memainkan peran penting dalam sektor perkebunan Indonesia. Keberlanjutan operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah menjadi isu strategis yang memerlukan pemahaman mendalam, terutama dalam konteks dinamika politik yang dapat berdampak langsung pada kelangsungan aktivitas perusahaan tersebut. Dengan memahami kompleksitas dinamika politik dan ekonomi yang memengaruhi sektor perkebunan, perusahaan dapat merancang strategi yang responsif, berkelanjutan, dan sesuai dengan tuntutan serta harapan berbagai pihak yang terlibat.

Dalam operasional perusahaan, peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangat vital, menjadi kunci dari berfungsinya elemen-elemen sumber daya lainnya. SDM di perusahaan memiliki berbagai karakter dan tujuan yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Perusahaan berupaya memiliki karyawan yang bertanggung jawab, loyal, berpribadi positif, dan memiliki sikap yang baik. Meskipun demikian, kehidupan karyawan di lingkungan kerja

tidak selalu lancar, terkadang mereka menghadapi hambatan yang dapat menyebabkan konflik dengan perusahaan. Setiap individu di perusahaan memiliki visi, misi, dan karakter yang berbeda-beda. Perbedaan ini kadang-kadang menyebabkan ketidakselarasan dan perbedaan pendapat, yang dapat menimbulkan ketidakcocokan antar individu. Hal ini dapat memunculkan konflik, baik antar karyawan, maupun antara karyawan dan atasan, yang akhirnya dapat mengganggu kinerja karyawan sehari-hari (Sinambela, 2016).

PTPN 4 Dolok Sinumbah, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, beroperasi dalam lanskap politik yang kompleks yang secara signifikan memengaruhi keberlanjutan dan kelangsungan operasionalnya. Memahami dinamika politik yang terkait dengan PTPN 4 Dolok Sinumbah menjadi krusial untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapinya. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak beragam dari dinamika politik terhadap keberlanjutan operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah (Marpaung, Sumarno, & Gunawan, 2020).

Dalam lingkup ini, dinamika politik dianggap sebagai faktor kritis yang mempengaruhi berbagai aspek keberlanjutan operasional perusahaan perkebunan. Pemahaman yang baik terhadap hubungan antara dinamika politik dan keberlanjutan operasional dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengelolaan yang efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi politik. Lingkungan politik secara signifikan membentuk kerangka regulasi di dalamnya PTPN 4 Dolok Sinumbah beroperasi. Kebijakan pemerintah terkait penggunaan lahan, peraturan ketenagakerjaan, dan standar lingkungan secara langsung memengaruhi operasional perkebunan. Misalnya, perubahan dalam hukum akuisisi tanah atau regulasi perlindungan lingkungan dapat menimbulkan tantangan terhadap ekspansi atau proses produksi PTPN 4 Dolok Sinumbah, yang mempengaruhi keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Terjadinya konflik di antara karyawan dapat berpengaruh pada tingkat kinerja mereka di perusahaan. Kinerja adalah cara karyawan menunjukkan hasil kerjanya dan biasanya digunakan sebagai penilaian baik bagi karyawan maupun perusahaan, sesuai dengan standar pencapaian tujuan tertentu. Kinerja ini menjadi hal penting dalam sebuah perusahaan dan menjadi acuan bagi karyawan untuk menunjukkan presentasi kerja, kinerja individu, dan kemampuan menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. Keberadaan konflik dapat memengaruhi kinerja karyawan, membuat perusahaan menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuan. Konflik di perusahaan sebaiknya segera diatasi dengan berbagai cara penyelesaian, agar konflik tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius yang dapat mengganggu karyawan dalam menjalankan tugasnya (Prasetya, Rahmawati, & Swasto, 2014).

PTPN 4 Dolok Sinumbah beroperasi di wilayah di mana berbagai pemangku kepentingan politik, termasuk pejabat pemerintah lokal dan nasional, pemimpin masyarakat, dan kelompok kepentingan, memiliki pengaruh. Konflik kepentingan dan persaingan kekuasaan di antara pemangku kepentingan ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi operasional perkebunan. Misalnya, klaim bersaing terkait penggunaan lahan atau ketidaksetujuan terkait pembagian pendapatan dapat mengganggu aktivitas bisnis PTPN 4 Dolok Sinumbah (Suprihatiningsih & Rahardjo, 2004).

Dinamika politik seputar pengembangan ekonomi dan lapangan kerja memiliki dampak langsung pada PTPN 4 Dolok Sinumbah. Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi tenaga kerja perkebunan, kebijakan upah, dan insentif investasi. Selain itu, keputusan politik terkait pengembangan infrastruktur, seperti jalan dan jaringan transportasi, dapat mempengaruhi rantai pasok dan akses pasar PTPN 4 Dolok Sinumbah. Hal ini membuat perusahaan merancang strategi operasional yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi politik, sehingga dapat tetap berkelanjutan dan efisien dalam menjalankan aktivitasnya

Persepsi publik terhadap operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah, yang sering dipengaruhi oleh wacana politik dan liputan media, dapat membentuk lisensi sosialnya untuk beroperasi. Concerns terkait lingkungan, praktik ketenagakerjaan, dan hubungan dengan masyarakat tunduk pada pengawasan publik, yang dapat diperkuat melalui saluran politik. Persepsi negatif yang dipicu oleh narasi politik dapat menyebabkan tekanan regulasi atau reaksi konsumen, yang mempengaruhi keberlanjutan Perkebunan (Napitu & Tarigan, 2022).

Untuk menavigasi interaksi kompleks dinamika politik dan memastikan keberlanjutan operasionalnya, PTPN 4 Dolok Sinumbah harus terlibat dalam strategi proaktif. Ini dapat melibatkan membangun hubungan yang transparan dan konstruktif dengan pemangku kepentingan politik, menyelaraskan operasinya dengan agenda pembangunan nasional, dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial. Dengan berpartisipasi aktif dalam dialog kebijakan dan keterlibatan pemangku kepentingan, PTPN 4 Dolok Sinumbah dapat memitigasi risiko politik dan memperkuat posisi keberlanjutannya.

Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis bagaimana dinamika politik memberikan dampak terhadap keberlanjutan operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah. Faktor politik yang melibatkan kebijakan pemerintah, pergeseran kekuasaan politik, dan dinamika konflik di tingkat lokal dan nasional menjadi fokus kajian untuk memahami peran mereka dalam menentukan arah dan kelangsungan operasional perusahaan.

Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap keterkaitan antara dinamika politik dan keberlanjutan operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam merancang strategi manajerial yang adaptif serta kebijakan yang mendukung kelangsungan sektor perkebunan di tengah perubahan dinamika politik yang mungkin terjadi di masa depan.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dinamika politik terhadap keberlanjutan operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah secara mendalam. Desain penelitian ini melibatkan pendekatan deskriptif dan eksploratif yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti (Abdussamad, 2021). Peneliti akan mengidentifikasi dan memilih informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam dinamika politik terhadap keberlanjutan operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan informan kunci. Wawancara akan direkam untuk keperluan analisis lebih lanjut. Setelah pengumpulan data, analisis tematik akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang

Halaman 8489-8502 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

muncul dari data. Data akan dibaca, dirangkum, dan diinterpretasikan secara sistematis. Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder (Afrizal, 2015). Sumber data primer akan dikumpulkan secara langsung dari informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan pengetahuan informan kunci mengenai dinamika politik terhadap keberlanjutan operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah. Observasi partisipatif akan memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung konteks dan dinamika yang terkait dengan dinamika politik terhadap keberlanjutan operasional. Sumber data sekunder akan digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis data primer. Sumber data sekunder akan berupa literatur, laporan riset, dokumen kebijakan, dan sumber data yang relevan lainnya yang telah ada sebelumnya (Creswell, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PTPN 4 Dolok Sinumbah merupakan sebuah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PTPN 4 memiliki peran strategis dalam sektor perkebunan nasional. Lokasinya berada di Dolok Sinumbah, sebuah wilayah yang dikenal dengan potensi pertanian yang subur. Perusahaan ini fokus pada kegiatan perkebunan dengan berbagai komoditas, termasuk kelapa sawit dan karet. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas utama yang dihasilkan, digunakan untuk produksi minyak kelapa sawit yang merupakan bahan baku penting dalam industri makanan, minuman, dan bahan bakar biodiesel. Sementara itu, produksi karet juga menjadi kontributor signifikan dalam portofolio produk perusahaan.

PTPN 4 Dolok Sinumbah tidak hanya berkomitmen pada aspek produksi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Upaya konservasi lingkungan dan partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat setempat merupakan bagian integral dari kebijakan perusahaan. Dengan pengalaman yang panjang dalam industri perkebunan, PTPN 4 Dolok Sinumbah terus berupaya meningkatkan produktivitas, kualitas, dan inovasi dalam operasionalnya. PTPN 4 juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sebagai entitas bisnis yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis, PTPN 4 Dolok Sinumbah terus beradaptasi dengan perkembangan industri perkebunan dan memastikan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan (Janah et al., 2024).

Faktor politik memainkan peran signifikan dalam membentuk lanskap operasional bagi bisnis, khususnya di sektor pertanian. PTPN 4 Dolok Sinumbah, sebagai badan usaha milik negara yang bergerak dalam budidaya kelapa sawit dan karet, tidak kebal terhadap pengaruh dinamika politik. Kebijakan dan Regulasi Kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dapat secara langsung memengaruhi operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah. Misalnya, perubahan kebijakan penggunaan lahan, regulasi lingkungan, atau hukum ketenagakerjaan dapat signifikan mempengaruhi biaya produksi, persyaratan kepatuhan, dan keseluruhan viabilitas bisnis. Selain itu, fluktuasi dalam kebijakan pajak, regulasi imporekspor, dan subsidi dapat secara langsung memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan.

Adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait perizinan dan regulasi di bidang perkebunan dapat berpengaruh pada operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah. Perubahan ini dapat mencakup aturan terkait penggunaan lahan, izin lingkungan, atau peraturan ketenagakerjaan yang dapat memengaruhi operasional Perusahaan. Intervensi Pemerintah Intervensi pemerintah, seperti penetapan kontrol harga, pembatasan ekspor, atau alokasi subsidi, dapat memiliki implikasi positif dan negatif bagi PTPN 4 Dolok Sinumbah. Sementara subsidi dapat meningkatkan daya saing perusahaan, intervensi berlebih atau perubahan kebijakan sembarangan dapat mengganggu kelangsungan operasional dan perencanaan investasi.

Dinamika lokal dan regional dinamika politik di tingkat lokal dan regional juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap keberlanjutan PTPN 4 Dolok Sinumbah. Hubungan dengan otoritas lokal, masalah penguasaan tanah, dan keterlibatan masyarakat adalah aspek kritis yang dapat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal. Faktor ketidakpastian politik, seperti pergeseran kekuasaan atau ketidakstabilan politik di tingkat lokal atau nasional, dapat menciptakan ketidakpastian bagi operasional perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan investasi, keamanan, dan regulasi yang dapat berdampak pada keberlanjutan PTPN 4 Dolok Sinumbah.

Konflik politik di tingkat lokal dapat mempengaruhi hubungan PTPN 4 Dolok Sinumbah dengan komunitas lokal. Pemahaman yang buruk atau ketegangan dengan pemerintah lokal atau masyarakat dapat menciptakan hambatan untuk operasional Perusahaan. Keterlibatan efektif dengan pihak-pihak politik, termasuk pembuat kebijakan, otoritas lokal, dan perwakilan masyarakat, sangat penting bagi PTPN 4 Dolok Sinumbah untuk menavigasi lanskap politik yang kompleks. Advokasi kebijakan yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan, tanggung jawab lingkungan, dan tanggung jawab sosial sangat penting untuk meredam potensi dampak negatif faktor politik.

Perubahan kebijakan perpajakan, seperti tarif pajak yang berubah atau insentif fiskal yang diberlakukan atau dicabut, dapat memengaruhi struktur biaya operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah. Hal ini dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan dan kemampuannya untuk berinvestasi. Tingkat keterlibatan dan dialog PTPN 4 Dolok Sinumbah dengan pemerintah dapat memengaruhi keberlanjutan operasional. Keterlibatan aktif dalam proses kebijakan, diskusi dengan pemangku kepentingan, dan keterbukaan terhadap perubahan politik dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung operasional perusahaan

Tantangan dan Peluang Interaksi faktor politik memberikan tantangan dan peluang bagi PTPN 4 Dolok Sinumbah. Sementara ketidakstabilan politik, beban regulasi, dan ketidakpastian kebijakan menimbulkan tantangan signifikan, adaptasi proaktif terhadap perubahan lanskap politik, kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan relevan, dan advokasi kebijakan yang mendukung dapat menciptakan peluang pertumbuhan berkelanjutan dan ketahanan operasional. Pemahaman mendalam terhadap permasalahan ini memungkinkan PTPN 4 Dolok Sinumbah untuk mengembangkan strategi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika politik, meminimalkan risiko, dan memastikan keberlanjutan operasionalnya dalam jangka Panjang.

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengawasan umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar. serta memberi nasehat kepada direksi. Karena mereka memiliki tugas untuk mengawasi dan memberi nasehat kepada dewan direksi, anggota dewan komisaris yang terkoneksi secara politik dapat mempengaruhi dewan direksi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan politisi yang terkoneksi politik tetapi tidak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan (Febrina, 2014).

Faktor politik memiliki peran krusial dalam membentuk lanskap operasional perusahaan, khususnya dalam kasus PTPN 4 Dolok Sinumbah yang bergerak di sektor pertanian, terutama kelapa sawit dan karet. Dalam konteks ini, akan dianalisis dampak positif dan negatif dari faktor politik tersebut terhadap operasional perusahaan. Faktor politik dapat memberikan dampak positif terhadap operasional perusahaan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan.

Kebijakan yang stabil memberikan prediktabilitas kepada perusahaan. Dengan mengetahui bahwa kebijakan tidak mengalami perubahan drastis, PTPN 4 Dolok Sinumbah dapat merencanakan kegiatan operasional dan investasi jangka panjang dengan lebih baik. Kebijakan yang konsisten dapat meningkatkan ketertarikan investor untuk berinvestasi dalam perusahaan. Ini karena investor cenderung mencari stabilitas dan kepastian hukum ketika memutuskan untuk menanamkan modalnya. Tentunya perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan jangka panjang, termasuk investasi dalam teknologi hijau, peningkatan efisiensi, dan diversifikasi produk. Kebijakan yang stabil menciptakan lingkungan yang mendukung perencanaan jangka panjang ini.

Lingkungan operasional yang didukung oleh kebijakan yang konsisten dapat memudahkan perusahaan dalam mematuhi regulasi. Ini membantu PTPN 4 Dolok Sinumbah untuk tetap beroperasi sesuai dengan standar lingkungan dan keberlanjutan. Pemerintah yang konsisten dalam mendukung industri perkebunan dapat memberikan perlindungan dan fasilitasi kepada perusahaan. Ini termasuk dukungan dalam hal perizinan, infrastruktur, dan proyek-proyek pembangunan yang mendukung keberlanjutan. Pemerintah yang konsisten dalam mendukung industri perkebunan dapat memberikan perlindungan dan fasilitasi dalam hal perizinan, infrastruktur, dan proyek-proyek pembangunan yang mendukung keberlanjutan (Saerang, Watung, & Kawet, 2016).

Adanya dukungan dari pemerintah tentunya dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dukungan dalam bentuk kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan memberikan insentif positif. Pemerintah seringkali memberikan insentif dan dukungan kepada bisnis dalam bentuk pemotongan pajak, hibah, dan subsidi. Inisiatif-inisiatif ini dapat meningkatkan inovasi, ekspansi, dan penciptaan lapangan kerja, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan Perusahaan. Kebijakan yang konsisten membantu membangun hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana PTPN 4 Dolok Sinumbah dapat beroperasi tanpa terlalu banyak hambatan atau ketidakpastian.

Stabilitas politik dapat memberikan kepercayaan kepada investor. Kepercayaan ini menciptakan iklim investasi yang positif, mengundang modal baru, dan mendukung

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan yang konsisten dan stabil menciptakan prediktabilitas, memudahkan perencanaan investasi jangka panjang. Ketika pemerintah menjaga kebijakan yang stabil dan konsisten, bisnis dapat beroperasi dengan perasaan prediktibilitas. Ini memupuk kepercayaan investor, memfasilitasi perencanaan dan investasi jangka panjang, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Dukungan politik terhadap praktik berkelanjutan dapat menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan citra perusahaan. Agendas politik yang memprioritaskan pengembangan infrastruktur dapat memberikan manfaat bagi bisnis dengan memperbaiki jaringan transportasi, sistem komunikasi, dan pasokan energi. Infrastruktur yang ditingkatkan dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan manajemen rantai pasok yang efisien. Kebijakan yang mendukung praktik berkelanjutan dalam bisnis dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan daya tarik konsumen (Laela Wulandari, 2018).

Dengan dampak positif ini, perusahaan dapat memanfaatkan kondisi politik yang mendukung untuk merencanakan pertumbuhan, mengoptimalkan operasional, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Penting bagi perusahaan untuk terus memantau perkembangan politik dan menjaga hubungan positif dengan pihak berwenang guna maksimalkan manfaat dari faktor politik yang mendukung. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih responsif terhadap perubahan politik, meminimalkan risiko, dan memperkuat kontribusi positifnya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Faktor politik juga dapat memberikan dampak negatif terhadap operasional perusahaan mencakup ketidakpastian regulasi, instabilitas politik, dan adopsi kebijakan proteksionisme. Perubahan sering dalam regulasi atau kebijakan pemerintah yang tidak jelas dapat menyebabkan biaya kepatuhan yang meningkat karena perusahaan harus terus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Bisnis mungkin enggan membuat komitmen jangka panjang atau investasi besar jika mereka tidak dapat memperkirakan atau memahami konsekuensi regulasi yang mungkin datang di masa depan. Regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dapat meningkatkan biaya produksi dan menyulitkan kepatuhan. Perubahan yang sering dalam regulasi atau kebijakan pemerintah yang ambigu dapat menciptakan ketidakpastian bagi bisnis. Biaya kepatuhan dapat meningkat, dan perusahaan mungkin ragu untuk melakukan komitmen atau investasi jangka panjang, menghambat pertumbuhan dan inovasi

Perubahan pemerintahan yang sering atau situasi politik yang tidak stabil dapat mengakibatkan gangguan langsung pada operasional perusahaan. Kebijakan yang dapat berubah dengan cepat dapat memaksa perusahaan untuk merespons secara cepat, menimbulkan ketidakpastian. Instabilitas politik dapat memicu gangguan dalam rantai pasok, termasuk kelancaran distribusi dan akses bahan baku, yang berpotensi merugikan operasional perusahaan. Perubahan kebijakan politik tanpa peringatan dapat menimbulkan ketidakpastian, mempersulit perencanaan strategis dan investasi. Keputusan politik terkait perjanjian perdagangan, tarif, atau langkah-langkah proteksionis dapat langsung mempengaruhi bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan dapat meningkatkan biaya, membatasi akses pasar, dan mengganggu rantai pasok yang sudah mapan.

Keputusan politik terkait proteksionisme atau hambatan perdagangan dapat meningkatkan biaya impor dan menurunkan akses perusahaan ke pasar internasional. Ini dapat merugikan perusahaan yang tergantung pada perdagangan internasional untuk bahan baku atau penjualan produk. Kebijakan proteksionis dapat mengganggu rantai pasok global, yang dapat berdampak pada produksi dan distribusi produk perusahaan. Kontrol harga atau pembatasan ekspor yang berlebihan dapat mengganggu mekanisme pasar dan operasional perusahaan. Instabilitas politik, seperti perubahan pemerintahan yang sering atau kerusuhan sipil, dapat mengganggu operasional bisnis, menyebabkan gangguan rantai pasok, menurunkan kepercayaan konsumen, dan menimbulkan potensi masalah keamanan bagi karyawan.

Dengan memahami dampak positif dan negatif dari faktor politik terhadap operasional, PTPN 4 Dolok Sinumbah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keberlanjutan bisnisnya dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang. Untuk mengatasi dampak negatif, perusahaan perlu mengembangkan strategi manajemen risiko, berpartisipasi dalam advokasi kebijakan, dan membangun fleksibilitas operasional guna beradaptasi dengan perubahan politik yang mungkin terjadi. Dengan pendekatan proaktif ini, PTPN 4 dapat memitigasi risiko politik dan memastikan kelangsungan operasional yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Faktor politik memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan bisnis, memengaruhi keberlanjutan operasional perusahaan di berbagai industri. Faktor-faktor ini mencakup kebijakan pemerintah, regulasi, stabilitas politik, dan hubungan internasional, yang semua dapat memengaruhi kemampuan sebuah perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. Sebagai respons terhadap tantangan ini, organisasi menggunakan berbagai strategi untuk menavigasi dan mengurangi dampak faktor politik pada operasional mereka. Perusahaan dapat mengatasi atau merespons faktor politik yang mempengaruhi keberlanjutan operasionalnya dengan mengadopsi strategi-strategi yang proaktif dan responsif.

Langkah pertama bagi perusahaan adalah memahami secara komprehensif lanskap politik di mana mereka beroperasi. Ini melibatkan pemantauan perkembangan politik, penilaian risiko potensial, dan pemahaman implikasi kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap kegiatan bisnis mereka. Dengan tetap terinformasi dan proaktif, perusahaan dapat mengantisipasi dan mempersiapkan diri terhadap gangguan potensial yang disebabkan oleh faktor politik. Analisis risiko politik secara teratur akan mengidentifikasi potensi dampak dari perubahan kebijakan, ketidakstabilan politik, atau faktor politik lainnya terhadap operasional perusahaan. Penting bagi PTPN 4 Dolok Sinumbah untuk memahami secara komprehensif lanskap politik di mana mereka beroperasi. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap kebijakan pemerintah, regulasi, dan dinamika politik yang mungkin mempengaruhi operasional perusahaan.

Pengaruh pada keputusan politik dapat dikejar melalui upaya advokasi dan lobbying. Perusahaan dapat berinteraksi dengan pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masalah regulasi dan membela kebijakan yang mendukung kepentingan bisnis mereka. Pendekatan proaktif ini memungkinkan perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang potensial membentuk

kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan operasional mereka. Aktif terlibat dalam advokasi kebijakan yang mendukung kepentingan perusahaan dan praktik berkelanjutan. Melibatkan diri dalam dialog dengan pemerintah, organisasi industri, dan kelompok advokasi dapat membantu mempengaruhi pembentukan kebijakan (Wakhyuni & Harahap, 2017).

Membangun hubungan yang baik dengan pihak berwenang, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat membantu perusahaan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan politik yang sedang berkembang dan memfasilitasi dialog konstruktif. Terlibat dengan pemangku kepentingan yang beragam, termasuk asosiasi industri, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah, dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengatasi tantangan politik. Dengan membangun hubungan dan kemitraan yang kuat, perusahaan dapat memperoleh dukungan dan memanfaatkan pengaruh bersama untuk mengatasi faktor politik yang mempengaruhi keberlanjutan operasional mereka.

Dengan sifat dinamis lingkungan politik, perusahaan harus dapat beradaptasi dan responsif terhadap perubahan regulasi. Ini mungkin melibatkan restrukturisasi operasional, modifikasi praktik bisnis, atau investasi dalam langkah-langkah kepatuhan untuk sejalan dengan regulasi baru. Dengan menunjukkan fleksibilitas dan ketangkasan, perusahaan dapat efektif menavigasi kompleksitas lanskap politik yang terus berkembang. Mengintegrasikan fleksibilitas dalam perencanaan strategis perusahaan untuk dapat merespons perubahan politik dengan cepat. Ini termasuk kemampuan untuk menyesuaikan strategi bisnis dan rencana investasi dalam waktu singkat.

Menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko politik. Ini melibatkan pengembangan skenario-skenario dan rencana darurat untuk menghadapi perubahan politik yang tidak terduga. Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan komunitas lokal, dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi terkait dampak politik. Ini dapat membangun dukungan dan meminimalkan potensi dampak negatif. Menganut pendekatan berkelanjutan dalam operasional bisnis. Dengan fokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan dapat memperoleh dukungan lebih besar dari pemerintah dan masyarakat.

Bagi perusahaan multinasional, dinamika geopolitik dan hubungan internasional dapat berdampak signifikan pada operasional global mereka. Fluktuasi dalam perjanjian perdagangan, ketegangan diplomatik, dan risiko geopolitik dapat menciptakan ketidakpastian dan gangguan bagi bisnis yang beroperasi lintas batas. Sebagai respons, perusahaan melakukan penilaian menyeluruh terhadap hubungan internasional untuk mengidentifikasi risiko dan peluang potensial, memungkinkan mereka membuat keputusan strategis yang terinformasi. Mempertimbangkan diversifikasi pasar dan sumber suplai untuk mengurangi risiko yang terkait dengan kebijakan perdagangan atau ketidakstabilan politik di satu pasar atau wilayah tertentu. Dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan kesiapannya menghadapi dampak faktor politik yang mempengaruhi operasionalnya, sekaligus menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis (Azzahra, Wardani, & Wulandari, 2023).

Ketidakstabilan politik dapat menimbulkan tantangan signifikan bagi individu, organisasi, dan negara. Ketidakpastian, volatilitas, dan potensi konflik dapat mengganggu aktivitas ekonomi, kebersamaan sosial, dan tata kelola secara keseluruhan. Dalam keadaan seperti ini, menjadi sangat penting untuk mengembangkan strategi khusus guna menavigasi dan mengurangi dampak dari ketidakstabilan politik dengan efektif. Strategi ini dapat mencakup pemantauan situasi politik secara terus-menerus, pengembangan rencana kontingensi, membangun jaringan dengan pihak-pihak terkait, serta berpartisipasi dalam advokasi kebijakan yang mendukung stabilitas politik dan keberlanjutan. Dengan demikian, individu, organisasi, dan negara dapat lebih baik menghadapi tantangan yang muncul akibat ketidakstabilan politik.

Pertama kali yang harus dilakukan adalah memahami akar penyebab dan dinamika ketidakstabilan politik sangat penting. Ini melibatkan analisis faktor-faktor historis, sosial, ekonomi, dan geopolitik yang berkontribusi pada situasi saat ini. Dengan memahami konteks secara komprehensif, individu dan organisasi dapat lebih baik mengantisipasi perkembangan potensial dan menyesuaikan strategi mereka secara sesuai. Ketahanan menjadi kunci untuk menahan guncangan dari ketidakstabilan politik. Ini melibatkan diversifikasi risiko, membangun jaringan yang kuat, dan mengembangkan kapasitas adaptif. Bagi bisnis, hal ini mungkin berarti mengeksplorasi peluang di berbagai pasar untuk melindungi diri dari risiko politik. Demikian pula, individu dan komunitas dapat membangun ketahanan dengan memperkuat ikatan sosial dan mengembangkan strategi mata pencaharian alternatif (Basit & Haryono, 2021).

Di lingkungan yang politiknya tidak stabil, terlibat dalam diplomasi dapat menjadi strategi krusial. Hal ini dapat melibatkan dialog dengan berbagai faksi politik, pelaku internasional, dan masyarakat lokal untuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi damai. Diplomasi juga dapat mencakup advokasi untuk hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokratis, dan supremasi hukum untuk mempromosikan stabilitas dan tata kelola yang baik. Pendidikan dan akses ke informasi yang akurat adalah alat yang kuat untuk melawan ketidakstabilan politik. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, masyarakat dapat memberdayakan individu untuk berpikir kritis, berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa, dan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Demikian pula, memastikan ketersediaan informasi yang tidak tendensius melalui media independen dan laporan berbasis fakta dapat melawan penyebaran informasi yang keliru dan propaganda.

Di era digital, teknologi dapat memainkan peran kunci dalam mengurangi dampak ketidakstabilan politik. Platform untuk komunikasi, koordinasi, dan advokasi dapat memfasilitasi mobilisasi sumber daya dan dukungan untuk komunitas yang terkena dampak. Selain itu, teknologi dapat memungkinkan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia, menyediakan sistem peringatan dini untuk potensi konflik, dan mendukung penyampaian bantuan kemanusiaan. Menghadapi situasi politik yang tidak stabil memerlukan strategi khusus agar perusahaan tetap dapat beroperasi dengan efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Menempatkan operasional di berbagai lokasi dapat mengurangi risiko ketidakstabilan politik di satu daerah. Diversifikasi dapat memberikan fleksibilitas dan meminimalkan dampak langsung dari perubahan politik di suatu wilayah.

- Membentuk tim atau mempekerjakan sumber daya yang bertanggung jawab untuk memantau perkembangan politik secara aktif. Dengan mendeteksi perubahan atau ketidakstabilan politik dengan cepat, perusahaan dapat lebih siap dalam mengambil tindakan proaktif.
- 3. Melakukan perencanaan skenario untuk mempersiapkan berbagai kemungkinan hasil politik yang dapat mempengaruhi perusahaan. Ini membantu dalam merancang strategi respons dan mengidentifikasi langkah-langkah darurat yang mungkin diperlukan.
- 4. Menerapkan pendekatan manajemen risiko yang lebih intensif, termasuk mengidentifikasi risiko politik kritis dan mengembangkan strategi mitigasi. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang dampak potensial dari perubahan politik dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelolanya.
- 5. Membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah. Kemitraan ini dapat membantu perusahaan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang dinamika politik lokal dan membangun dukungan dalam situasi yang tidak stabil (Christian, 2015).
- 6. Menerapkan kebijakan keuangan yang konservatif dengan menjaga cadangan dana yang cukup. Ini dapat membantu perusahaan bertahan dalam periode ketidakpastian politik tanpa terlalu bergantung pada akses ke sumber dana eksternal.
- 7. Mengelola komunikasi dengan cermat, baik secara internal maupun eksternal. Menjaga transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu menjaga kepercayaan di tengah ketidakpastian politik.
- 8. Terlibat dalam advokasi politik dengan berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah dan kelompok advokasi. Memiliki suara dalam proses kebijakan dapat membantu perusahaan memengaruhi regulasi yang dapat memengaruhi keberlanjutan operasional.
- 9. Menggunakan teknologi untuk pemantauan dan pengumpulan data politik yang lebih efisien. Algoritma analisis risiko politik dan intelijen bisnis dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat (Julio & Yook, 2012).

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi dan bertahan di tengah situasi politik yang tidak stabil. Langkah-langkah ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko dengan lebih baik dan merespons secara efektif terhadap perubahan politik yang mungkin terjadi. Selain itu, perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan bisnis, menjaga stabilitas operasional, dan meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi politik. Ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat tetap fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial.

SIMPULAN

PTPN 4 Dolok Sinumbah, sebagai perusahaan perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berfokus pada kegiatan perkebunan dengan komoditas utama seperti kelapa sawit dan karet. Selain berkomitmen pada aspek produksi, perusahaan ini juga

menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Faktor politik memainkan peran penting dalam membentuk lanskap operasional PTPN 4 Dolok Sinumbah. Kebijakan dan regulasi pemerintah dapat langsung memengaruhi operasional perusahaan, seperti perubahan kebijakan penggunaan lahan, regulasi lingkungan, atau hukum ketenagakerjaan. Intervensi pemerintah, seperti kontrol harga, pembatasan ekspor, atau alokasi subsidi, juga dapat berdampak pada keberlanjutan operasional. Dinamika politik di tingkat lokal dan regional memiliki dampak signifikan, termasuk hubungan dengan otoritas lokal, keterlibatan masyarakat, dan ketidakpastian politik. Konflik politik di tingkat lokal dapat mempengaruhi hubungan dengan komunitas dan menciptakan hambatan operasional. Meskipun faktor politik dapat membawa tantangan, juga terdapat peluang. Kebijakan pemerintah yang mendukung pertanian berkelanjutan, insentif fiskal, dan stabilitas politik dapat meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Dukungan politik terhadap praktik berkelanjutan juga dapat menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan citra perusahaan. Dalam menghadapi dampak faktor politik, PTPN 4 Dolok Sinumbah dapat menerapkan strategi-strategi seperti diversifikasi lokasi operasional, pemantauan aktif perkembangan politik, perencanaan skenario, dan kebijakan keuangan konservatif. Melalui langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan ketangguhan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan politik yang mungkin terjadi. Mengintegrasikan fleksibilitas dalam perencanaan strategis, terlibat dalam advokasi kebijakan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan juga merupakan langkah-langkah penting untuk mengatasi dampak faktor politik. Kesadaran terhadap dinamika geopolitik dan hubungan internasional juga penting bagi perusahaan multinasional untuk menjaga keberlanjutan operasional global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press.
- Afrizal. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Press.
- Azzahra, F. A., Wardani, I., & Wulandari, L. N. R. (2023). Risiko Politik Dalam Dunia Bisnis. *JMCBUS: Journal of Management and Creative Business*, 1(3), 49–69. https://doi.org/https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i3.1151
- Basit, A., & Haryono, S. (2021). Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Faktor Ekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *JAA: Jurnal Akademi Akuntansi*, *5*(2), 220–237.
- Christian, B. (2015). Instabilitas Politik dan Ekspor Tingkat Perusahaan: Bukti dari Indonesia. *Thesis*. Depok: Universitas Indonesia.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febrina, R. (2014). Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 71. https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2090
- Janah, I. N., Fatihah, S. N., Adimah, I., Holisin, N., Bidayanto, D. E., & Mu'alimin. (2024). Literatur Review Strategi Mengidentifikasi Tahapan dan Dampak Konflik Terhadap Organisasi. *MUQADDIMAH: Jurna Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1),

- 135–147. https://doi.org/https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i1.583
- Julio, B., & Yook, Y. (2012). Political Uncertainty and Corporate Investment Cycles. *The Journal of Finance*, *67*(1), 45–83. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01707.x
- Laela Wulandari. (2018). Pengaruh Political Connection Pada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2010-2014. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 1196–1226.
- Marpaung, D., Sumarno, S., & Gunawan, I. (2020). Prediksi Produktivitas Kelapa Sawit di PTPN IV dengan Algoritma Backpropagation. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 1(2), 35–41. https://doi.org/https://doi.org/10.30865/klik.v1i2.48
- Napitu, R., & Tarigan, W. J. (2022). Dampak Konflik dan Stress Kerja terhadap Kinerja pada PTPN IV Dolok Sinumbah. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 290–298.
- Prasetya, A., Rahmawati, N. P., & Swasto, B. (2014). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 8(2), 1–9.
- Saerang, L. S., Watung, R., & Kawet, L. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi, Pelatihan, dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tomohon). *Jurnal EMBA*, *4*(2), 828–837.
- Saragih, J. P. (2014). Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *5*(2), 200–224. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v5i2.340
- Sinambela, L. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprihatiningsih, & Rahardjo. (2004). Akar dan Resolusi Konflik: Studi Tentang Konflik Tanah Garapan di Area Hak Guna Usaha (HGU) Kebon Dolok Sinumbah, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara. *Thesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wakhyuni, E., & Harahap, U. S. S. (2017). Pengaruh Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Perusahaan Terhadap Sistem Pengambilan Keputusan Pada PTPN III Kantor Pusat Medan. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, *10*(2), 1886–1892.
- Warjio. (2016). *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi.* Jakarta: Kencana.